# Kolaborasi Dan Kepemimpinan Lintas Agama Dalam Mempromosikan Harmoni Sosial: Wawasan Dari Pekon Pancasila Mataram, Pringsewu

Oleh:
**Suyono**
Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung
ssuyono876@gmail.com

**ABSTRAK**

Studi mengenai moderasi beragama kerap berfokus pada ranah kebijakan nasional atau institusi formal tingkat makro, sehingga meluputkan dinamika mikro dan praktik kerukunan di tingkat akar rumput. Artikel ini bertujuan mengisi celah akademis tersebut dengan menganalisis secara mendalam praktik inklusivitas dan kolaborasi kerukunan lintas agama di Pekon (Desa) Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung—sebuah kawasan multikultural yang secara informal dan emik dijuluki sebagai 'Pekon Pancasila'. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi etnografi sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 28 informan kunci (meliputi Kepala Pekon, aparat pekon, tokoh agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, tokoh pemuda, serta masyarakat awam), observasi partisipatif intensif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmoni sosial yang berkelanjutan di Pekon Mataram ditopang oleh empat pilar interaksi yang saling menguatkan: (1) Dialog lintas agama organik yang bergeser dari sekadar wacana elitis-seremonial menuju everyday interfaith dialogue dalam perjumpaan harian warga; (2) Kegiatan bersama sebagai perekat sosial yang membangun modal sosial jembatan (bridging social capital) melalui pengamanan swabantu perayaan keagamaan dan kegiatan kebudayaan; (3) Pelembagaan kearifan lokal gotong royong dan mekanisme deliberasi musyawarah berfalsafah 'yo opo enake'; serta (4) Kepemimpinan inklusif (inclusive leadership) dari pimpinan pekon dan para penganjur agama yang bertindak sebagai mediator budaya (cultural mediators). Kajian ini menyimpulkan bahwa kohesi sosial di masyarakat majemuk tidak dapat dipaksakan melalui regulasi instruktif top-down semata, melainkan dirawat melalui pelembagaan kebiasaan sosial yang dialogis dan partisipatif di tingkat lokal.

***Kata Kunci: Inklusivitas Beragama, Pekon Pancasila, Dialog Lintas Agama Organik, Kepemimpinan Inklusif, Harmoni Sosial, Pringsewu.***

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara paling majemuk di dunia, baik dari segi etnis, bahasa, suku, maupun agama. Dengan populasi melebihi 275 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau, struktur sosial

Indonesia dibentuk oleh jalinan keragaman yang sangat kompleks (Dukcapil Kemendagri, 2024). Di satu sisi, pluralitas ini merupakan kekayaan kultural yang luar biasa dan menjadi fondasi utama pembentukan identitas kebangsaan di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Acim et al., 2023). Keanekaragaman tradisi, ekspresi keagamaan, serta kearifan lokal di berbagai penjuru nusantara menjadi bukti kekayaan peradaban yang terus hidup dan berkembang.

Namun, dalam perspektif sosiologis, kemajemukan yang sangat tinggi juga menyimpan potensi kerentanan struktur sosial yang signifikan (Noor, 2019). Perbedaan garis identitas primordial—apabila diartikulasi secara eksklusif dan diprovokasi oleh kepentingan politik atau sosio-ekonomi—dapat dengan mudah tereskalasi menjadi konflik horizontal. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah mencatat beberapa episode kelam konflik antaretnis dan antaragama, seperti kerusuhan sosial di Maluku dan Poso pada transisi milenium (Qurtuby, 2016), serta berbagai kasus ketegangan lokal terkait pendirian rumah ibadah dan prasangka antar-kelompok agama (Sair & Elanda, 2021). Dinamika ini menegaskan bahwa kerukunan dan harmoni sosial bukanlah kondisi statis yang terberi (given), melainkan sebuah proses sosial yang dinamis dan harus terus-menerus dirawat, diperjuangkan, serta dikelola secara bijaksana.

Sebagai langkah strategis untuk meredam potensi disintegrasi bangsa dan memperkuat jalinan kebangsaan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengarusutamakan kebijakan Moderasi Beragama. Puncak dari komitmen normatif ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Setkab, 2023). Kebijakan ini menetapkan empat pilar utama moderasi, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama RI, 2023). Untuk mengimplementasikan Perpres tersebut, Kementerian Agama merancang berbagai program aksi, salah satunya adalah pencanangan 1.000 Kampung Moderasi Beragama (KMB) di 34 provinsi (Kementerian Agama RI, 2024; Danunih, 2024).

Meskipun program pencanangan KMB menunjukkan itikad politik yang kuat dari negara, sejumlah peneliti sosiologi keagamaan kritis menyoroti adanya jurang

pemisah (gap) antara formulasi kebijakan di tingkat makro dengan realitas sosial di tingkat mikro (Akhmadi, 2019; Suprapto, 2025). Program kementerian sering kali bersifat birokratis dan 'top-down', di mana penunjukan sebuah desa sebagai Kampung Moderasi lebih terkesan sebagai pemberian 'label' administratif untuk mengejar target instansi daripada pengakuan terhadap mekanisme interaksi organik masyarakat (Ilham, 2023). Pendekatan yang terlalu administratif meresikokan reduksi moderasi beragama menjadi sekadar seremoni formalistis tanpa menyentuh akar kepatuhan dan kesadaran sosial warga lokal (Parhusip, 2024).

Di tengah keterbatasan pendekatan struktural-formal tersebut, beberapa komunitas lokal di Indonesia telah berhasil mengembangkan model kerukunan yang berakar kuat pada tradisi dan kesadaran mandiri warga (bottom-up approach). Salah satu contoh fenomenal tersebut dapat ditemukan di Pekon (Desa) Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pekon Mataram merupakan pemukiman multikultural dan multiagama yang dihuni oleh pemeluk agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha, yang hidup berdampingan secara damai dan harmonis selama puluhan tahun.

Masyarakat luas dan pemerintah daerah secara informal menyematkan julukan 'Pekon Pancasila' kepada Pekon Mataram. Julukan ini bukan semata-mata slogan politis, melainkan pengakuan sosial atas keberhasilan warga dalam mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila—khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia—ke dalam praktik kehidupan sehari-hari (Haidar et al., 2023). Di Pekon Mataram, perbedaan keyakinan tidak menjadi sekat pemisah dalam interaksi sosial, melainkan diintegrasikan secara elastis melalui struktur kepemimpinan lokal, kohesi kebudayaan, dan kegiatan kemasyarakatan yang inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus etnografis (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kedalaman makna, nuansa interaksi, serta persepsi subjektif para aktor sosial yang terlibat dalam praktik kerukunan lintas agama di Pekon Mataram. Penulis berupaya memahami fenomena kerukunan bukan dari persepsi peneliti semata (etik), melainkan

menggalinya dari konstruksi pemikiran dan pengalaman warga setempat (emik).

Penelitian dilaksanakan di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Informan ditentukan menggunakan teknik snowball sampling dan purposive sampling dengan total 28 informan kunci (meliputi aparat pekon, tokoh agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, tokoh pemuda, dan warga umum). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif selama 5 bulan, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

| Dimensi Harmoni Sosial | Deskripsi Praktik Operasional di Pekon Mataram |
|---|---|
| **1. Dialog Lintas Agama Organik** | Interaksi harian warga (everyday dialogue) di pos ronda, pasar, dan balai pekon; memecah stereotip dan mengedepankan kesamaan emosional. |
| **2. Kegiatan Bersama (Social Capital)** | Pengamanan swabantu hari raya keagamaan, kerja bakti fasilitas publik, serta karnaval kebudayaan inklusif. |
| **3. Pelembagaan Kearifan Lokal** | Penerapan tradisi gotong royong dan deliberasi musyawarah berbasis filosofi 'yo opo enake' untuk penyelesaian masalah warga. |
| **4. Kepemimpinan Inklusif** | Peran Kepala Pekon dan penganjur agama sebagai mediator budaya (cultural mediator) yang responsif dan tidak partisial. |

## II. PEMBAHASAN

### 1. Sosio-Demografi Pekon Mataram: Modal Sosial Multikultural

Pekon Mataram secara historis dibentuk oleh gelombang migrasi penduduk (program transmigrasi era kolonial dan kemerdekaan) serta mobilitas swakarsa dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Nama 'Mataram' sendiri merefleksikan identitas historis pemukim awal yang membawa kearifan budaya Jawa, yang kemudian berinteraksi secara harmonis dengan komunitas migran Hindu dari Bali serta warga lokal Lampung.

Berdasarkan data monografi pekon terbaru, mayoritas penduduk memeluk agama Islam (sekitar 55%), disusul oleh pemeluk Katolik dan Kristen Protestan (25%), Hindu (15%), dan Buddha (5%). Di pekon ini berdiri secara berdampingan

berbagai rumah ibadah, meliputi Masjid, Gereja Katolik, Gereja Kristen, Pura, dan Vihara. Struktur pemukiman warga tidak menunjukkan sekat-sekat segregasi spasial berbasis agama. Dalam satu rukun tetangga (RT) atau bahkan satu dusun, rumah warga Muslim, Nasrani, dan Hindu berdiri berdampingan tanpa batas pagar yang kaku.

**Realitas Toleransi Harian di Pekon Mataram**

*"Di Pekon Mataram ini, mas, perbedaan agama itu sudah seperti perbedaan warna baju. Tetangga sebelah kanan saya Katolik, sebelah kiri Hindu, dan depan rumah saya Muslim. Kami kalau bertegur sapa setiap pagi ya biasa saja, saling bantu kalau ada yang hajatan. Agama itu urusan keyakinan masing-masing dengan Tuhan, tapi dalam bertetangga kami semua adalah saudara." (Hasil Wawancara dengan Bapak Suwandi, Tokoh Masyarakat Pekon Mataram)*

## 2. Empat Pilar Harmoni Sosial di Pekon Mataram

Kerukunan sosial yang kokoh di Pekon Mataram disokong oleh empat pilar sosiologis yang saling bertautan dan menguatkan:

*1.* Dialog Lintas Agama: Dari Ritual Seremonial ke *Everyday Interfaith Dialogue*

Secara konvensional, dialog lintas agama sering kali dipahami sebagai pertemuan elite formal di dalam ruang seminar atau konferensi seremonial yang digagas oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) atau lembaga pemerintah (Soffi, 2023). Walaupun dialog elite tersebut memiliki fungsi normatif, keterbatasannya terletak pada ketidakmampuannya menjangkau perubahan sikap di tingkat akar rumput. Kajian di Pekon Mataram menunjukkan transformasi bentuk dialog dari yang semula seremonial menjadi everyday interfaith dialogue (dialog lintas agama harian) (Casavecchia et al., 2023).

Di Pekon Mataram, dialog antar-penganut agama terjadi secara alami, intensif, dan tidak terstruktur dalam ruang-ruang publik warga. Warga berdialog ketika berkumpul di pos ronda malam, saung tani di sawah, warung makan, hingga pada saat tradisi takziah kematian. Topik pembicaraan tidak berfokus pada debat dogmatis-teologis yang sensitif, melainkan pada isu-isu praktis kehidupan bersama. Sebagaimana dikemukakan oleh Appleby (2000) dan Abu-Nimer (2001), dialog harian ini mereduksi prasangka (prejudice) dan memecah stereotip negatif, sejalan dengan konsep action-oriented dialogue dari Patel (2012).

2. Kegiatan Bersama sebagai Perekat Sosial (*Bridging Social Capital*)

Dalam teori modal sosial yang dikembangkan oleh Robert Putnam (2000), modal sosial dibedakan menjadi bonding social capital (eksklusif internal kelompok) dan bridging social capital (jembatan antar-kelompok). Pekon Mataram berhasil memperkuat bridging social capital melalui serangkaian kegiatan bersama. Saat hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal, Nyepi), pengamanan dilakukan secara swabantu lintas pemuda agama (Banser, Pemuda Gereja, Pecalang). Selain itu, kegiatan karnaval kebudayaan HUT RI ke-17 Agustus menciptakan collective effervescence (Durkheim, 1912; Ritzer, 2014) yang meleburkan sekat-sekat dogmatis menjadi perekat kebangsaan.

3. Pelembagaan Kearifan Lokal: Gotong Royong dan Musyawarah *'Yo Opo Enake*'

Pelembagaan kearifan lokal (local wisdom) menjadi mekanisme normatif penting dalam mengelola komunitas (Etzioni, 1996). Gotong royong di Pekon Mataram tidak hanya dimaknai secara fisik, melainkan berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi sosial alami (Geertz, 1982; Lederach, 2017). Ketika muncul dinamika antar-warga, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah berfalsafah lokal Jawa-Lampung: 'Yo opo enake' (Bagaimana baiknya dan bahagianya bersama) (Sa'ir, Sholahudin & Trihartono, 2020). Falsafah ini mengedepankan solusi win-win dan restoratif tanpa menciptakan pihak yang merasa terkalahkan.

4. Kepemimpinan Inklusif (*Inclusive Leadership*) dan Peran Cultural Mediators

Teori kepemimpinan inklusif (Feldman, Khademian & Quick, 2009) menegaskan pentingnya pemimpin yang membuka ruang partisipasi luas. Kepala Pekon Mataram menjalankan peran netral dan adil dalam alokasi pembangunan serta hadir mengayomi seluruh perayaan agama warga. Di samping pimpinan formal, para tokoh agama (Kiai, Pendeta, Romo, Pinandita) bertindak sebagai cultural mediators (mediator budaya) yang mengajarkan narasi teologi inklusif dan meredam potensi isu sensitif eksternal (Setia & Rahman, 2022).

Temuan empiris di Pekon Mataram mengonfirmasi Teori Kontak Sosial (Allport, 1954), di mana interaksi berkala antar-kelompok dapat mengikis prasangka apabila memenuhi syarat status setara, tujuan bersama, kerja sama, dan dukungan otoritas.

Ketahanan sosial (social resilience) warga Pekon Mataram terbukti ampuh membendung potensi provokasi sektarian pada momen pemilu atau pilkada, karena basis modal sosial dan kepercayaan warga telah mengakar secara organik.

## II. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keharmonisan sosial di Pekon Pancasila Mataram, Kabupaten Pringsewu, merupakan wujud kerukunan organik (organic tolerance) yang dibangun dari bawah (bottom-up). Harmoni ini disokong oleh empat pilar utama: (1) Transformasi dialog lintas agama menuju everyday interfaith dialogue; (2) Penguatan bridging social capital melalui kegiatan bersama; (3) Pelembagaan kearifan lokal gotong royong dan musyawarah berfalsafah 'yo opo enake'; serta (4) Kepemimpinan inklusif dari pimpinan pekon dan tokoh agama sebagai mediator budaya.

1. Bagi Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah: Kebijakan Kampung Moderasi Beragama (KMB) hendaknya dialihkan dari sekadar pelabelan birokratis-formal menjadi dukungan fasilitatif terhadap ruang-ruang perjumpaan organik warga.
2. Bagi Pemerintah Desa/Pekon Multikultural: Model kolaborasi lintas agama dan musyawarah 'yo opo enake' di Pekon Mataram layak dijadikan best practice (teladan) untuk direplikasi di wilayah lain di Indonesia.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan melakukan studi komparatif longitudinal antara desa dengan kerukunan organik dan desa pasca-konflik guna mengidentifikasi variabel-variabel penentu ketahanan sosial secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu-Nimer, M. (2001). Conflict resolution, culture, and religion: Toward a training model of interreligious peacebuilding. Journal of Peace Research, 38(6), 685–704. https://doi.org/10.1177/0022343301038006003

Acim, Subagja, D. J., Afiani, D. A., Pratama, G. R., & Al Kautsar, F. (2023). Exploring cultural diversity in Indonesia: Models, responses, and multicultural politics. CANDIDATE: Jurnal Sains Politik, 1(1), 35–55.

Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Jurnal Diklat Keagamaan, 13(2), 45–55.

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley.

Appleby, R. S. (2000). The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation. Rowman & Littlefield Publishers.

Casavecchia, A., Carbone, C., & Canta, A. F. (2023). Living interfaith dialogue during the lockdown: The role of women in the Italian case. Religions, 14(2), Article 252. https://doi.org/10.3390/rel14020252

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Danunih. (2024). Kampung Moderasi Beragama. Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. https://penais.kemenag.go.id/kmb/

Dukcapil Kemendagri. (2024). Data kependudukan dan keragaman Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. https://dukcapil.kemendagri.go.id/

Durkheim, É. (1912). The elementary forms of the religious life (J. W. Swain, Trans.). George Allen & Unwin.

Etzioni, A. (1996). The responsive community: A communitarian perspective. American Sociological Review, 61(1), 1–11. https://doi.org/10.2307/2096403

Feldman, M. S., Khademian, A. M., & Quick, K. S. (2009). Ways of knowing, inclusive management, and promoting democratic engagement. International Public Management Journal, 12(2), 123–136. https://doi.org/10.1080/10967490902873424

Geertz, C. (1982). Abangan, santri, priyayi dalam masyarakat Jawa. Pustaka Jaya.

Haidar, A., Kiftiyah, A., Permadi, D. P., Herindar, E., Alim, F. S., & Yantari, H. F. (2023). Moderasi beragama di tengah isu kontemporer. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI.

Huda, M., & Pratiwi, S. P. (2022, Maret 31). Melihat Kampung Pancasila di Desa Senduro Lumajang, hidup berdampingan dalam keragaman. Kompas.com. https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/31/082838778/

Huda, M. Q., Sulaeman, M., & Marpuah, S. (2023). Inclusivity in Islamic conservatism: The moderate movement in Kediri, Indonesia. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 7(1), 77–92. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i1.22648

Ilham. (2023, Juli 27). Desa di Lumajang wakili Kampung Moderasi Beragama Jatim. Kolomdesa.com. https://kolomdesa.com/2023/07/27/

Kementerian Agama RI. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI. (2024). Capaian dan peta sebaran 1.000 Kampung Moderasi Beragama di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Lederach, J. P. (2017). Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies. United States Institute of Peace Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Noor, A. F. (2019). Multicultural education based in the local wisdom of Indonesia for elementary schools in the 21st century. Journal of International Social Studies, 9(1), 94–106.

Parhusip, A. (2024). Exploring the evolution of religious moderation leadership from the local to national level. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 80(1), Article a8630. https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8630

Patel, E. (2012). Sacred ground: Pluralism, prejudice, and the promise of America. Beacon Press.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

Qurtuby, S. A. (2016). Religious violence and conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in the Moluccas. Routledge.

Ritzer, G. (2014). Teori sosiologi modern (Edisi ke-7). Prenadamedia Group.

Sa'ir, A., Sholahudin, U., & Trihartono, A. (2020). Social and cultural behavior in handling urban issues: The case of Surabaya, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 485(1), Article 012012. https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012012

Sair, A., & Elanda, Y. (2021). The cultural negotiation of being Shia and Madurese. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 8(1), 40–59. https://doi.org/10.19105/islamuna.v8i1.4300

Sair, A., & Sholahudin, U. (2025). Cross-religious collaboration and leadership in promoting social harmony: Insights from "Kampung Moderasi Beragama" Senduro, Lumajang. Jurnal Sosiologi Agama, 19(1), 27–38.

Setia, P., & Rahman, M. T. (2022). Socializing religious moderation and peace in the Indonesian landscape. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 2(3), 333–340. https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.17916

Setkab. (2023, September 27). Presiden Jokowi terbitkan Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-58-2023-tentang-penguatan-moderasi-beragama/

Soffi, D. A. (2023). Dialog lintas iman: Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membangun kehidupan toleransi umat beragama. WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 7(2), 176–192. https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2023.007.02.5

Suprapto, S. (2025). Religious moderation in Indonesia: Concept, practice, and challenges. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 13(1), 1–14.